



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
**BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II**

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008
Laman www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id, Pos-el ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id

5 Januari 2026

Nomor : 800.2.4.1/031/PPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penawaran Program Pelatihan
Kepemimpinan Administrator (PKA) dan
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
Tahun Anggaran 2026.

Yth. 1. Para Kepala BPSDM Provinsi,
2. Para Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota
Wilayah Kerja BBPK APDN II,
3. Para Kepala Instansi pemerintah lainnya.
di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 49 yang menegaskan bahwa pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, serta merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 54 ayat (1) huruf f, ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf e menyebutkan bahwa kompetensi Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana meliputi Kompetensi Teknis, **Kompetensi Manajerial**, dan Kompetensi Sosial Kultural.

ASN yang menduduki jabatan Administrator dan Pengawas wajib memenuhi standar kompetensi manajerial ini diukur salah satunya dari pengalaman kepemimpinan atau pelatihan struktural/kepemimpinan.

Sebagai suatu lembaga pelatihan terakreditasi, BBPK APDN II yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSDM Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri mempunyai Wilayah Kerja (Provinsi beserta Kabupaten/Kota di dalamnya, antara lain: 1) Provinsi Lampung; 2) Provinsi DKI Jakarta; 3) Provinsi Jawa Barat; 4) Provinsi Banten; 5) Provinsi Kalimantan Barat; 6) Provinsi Kalimantan Tengah; 7) Provinsi Kalimantan Selatan; 8) Provinsi Kalimantan Timur; dan 9) Provinsi Kalimantan Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat kami mengajak para Kepala BPSDM Provinsi dan Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota, para kepala instansi pemerintah atau sebutan lain untuk bekerja sama dalam hal keikutsertaan ASN dalam program pengembangan kompetensi PKA dan PKP dengan pola pembelajaran **blended learning** serta mekanisme pembiayaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan jadwal dan persyaratan sebagaimana Lampiran I dan II surat ini.

Hal-hal lain terkait penyelenggaraan pelatihan dimaksud dapat menghubungi narahubung **Sdri. Neta S. Mutiawati S.Sos., M.AP (HP. 0815-6107-683)** atau **Sdr. Deny Herdiyana, S.Kom., M.AP., (HP. 0821-1112-7761).**

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik oleh:
Kepala,

Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198301042008121001

Tembusan :

1. Kepala BPSDM Kemendagri;
2. Sekretaris BPSDM Kemendagri; dan
3. Arsip.

JADWAL PENYELENGGARAAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)

DAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) PNB

BBPK APDN II TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PELATIHAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1.	PKA ANGKATAN KE I	23 Februari 2026 s.d. 2 Juli 2026	
2.	PKA ANGKATAN KE II	30 Maret 2026 s.d. 30 Juli 2026	
3.	PKA ANGKATAN KE III	20 April 2026 s.d. 28 Agustus 2026	
4.	PKA ANGKATAN KE IV	27 Juli 2026 s.d. 27 November 2026	
5.	PKA ANGKATAN KE V	27 Juli 2026 s.d. 27 November 2026	
6.	PKA ANGKATAN KE VI	24 Agustus 2026 s.d. 18 Desember 2026	
7.	PKP ANGKATAN KE I	24 Februari 2026 s.d. 2 Juli 2026	
8.	PKP ANGKATAN KE II	31 Maret 2026 s.d. 30 Juli 2026	
9.	PKP ANGKATAN KE III	21 April 2026 s.d. 28 Agustus 2026	
10.	PKP ANGKATAN KE IV	28 Juli 2026 s.d. 27 November 2026	
11.	PKP ANGKATAN KE V	26 Agustus 2026 s.d. 18 Desember 2026	
12.	PKP ANGKATAN KE VI	26 Agustus 2026 s.d. 18 Desember 2026	



Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik oleh:
Kepala,

Dr.Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198301042008121001

PERSYARATAN PKA DAN PKP BBPK APDN II PNPB TAHUN ANGGARAN 2026

A. PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)

Peserta menyiapkan persyaratan dalam bentuk *softfile* dan diunggah pada saat heregistrasi online, yakni:

1. Telah menduduki dalam:
 - a) Jabatan administrator;
 - b) Jabatan fungsional jenjang ahli madya;
 - c) Jabatan pengawas dengan pangkat/gol ruang paling rendah pangkat penata III/c.
 - d) Jabatan fungsional yang setingkat jabatan pengawas, paling rendah dengan pangkat/gol ruang III/c.
 - e) Jabatan pelaksana yang memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS dan paling rendah dengan pangkat/gol ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; dan
 - f) Batas usia maksima 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun.
2. Telah mengikuti dan lulus PKP;
3. Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir;
4. Keputusan pangkat dan golongan terakhir;
5. Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
6. Surat keterangan sehat dari klinik pemerintah;
7. Surat narkoba dari BNN/dinkes/klinik pemerintah;
8. Surat keterangan kelakuan baik dari Polres;
9. Surat rekomendasi dari BPSDM/BKPSDM bagi pendaftar perorangan;
10. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak sedang berproses penetapan hukuman disiplin dari Biro SDM/BKD;
11. Pas Foto 4x6 background merah, pakaian hitam putih berdasi hitam polos lengkap atribut.

B. PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)

1. Telah menduduki dalam:
 - a) Jabatan pengawas;
 - b) Paling rendah JF yang setingkat jabatan pelaksana dengan pangkat paling rendah penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja dalam

pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau

c) Jabatan pelaksana paling rendah dengan pangkat penata muda dan golongan ruang III/a dengan masa kerja sebagai PNS paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

2. Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir;
3. Keputusan pangkat dan golongan terakhir;
4. Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
5. Surat keterangan sehat dari klinik pemerintah;
6. Surat narkoba dari BNN/dinkes/klinik pemerintah;
7. Surat keterangan kelakuan baik dari Polres;
8. Surat rekomendasi dari BPSDM/BKPSDM bagi pendaftar perorangan;
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau tidak sedang berproses penetapan hukuman disiplin dari Biro SDM/BKD;
10. Pas Foto 4x6 background merah, pakaian hitam putih berdasi hitam polos lengkap atribut.



Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik oleh:
Kepala,

Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198301042008121001